



Pasai

Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial

Volume 9, Nomor 2, Nopember 2015



Photographer: Zainal Abidin; Model Sandra Dewi

Etika Belajar Dan Mengajar: (Suatu Upaya Meningkatkan Karakter dan Mutu Pendidikan)

Al Mawardi

The Influence Of Parents' Involvement In Motivating Students In Learning To Their Achievement In English, (A Case Study at the Second Year Student of MAN Matangkuli)

Henny Irawati, S.Ag., M.Pd

Strategi Pemberdayaan Guru Di Smp Negeri 1 Teupah Barat Kabupaten Simeulue

Sulfian, S.Pd. M.Pd

Jurnal Pasai

Volume 9, Nomor 2, Nopember 2015, ISSN 1979-1755

Pembina:

Dr. Apridar, SE.,M.Si

Penanggung Jawab/Pimpinan Umum:

Yulius Dharma, S.Ag, M. Si

Pimpinan Redaksi:

Al Chaidar, S.IP

Mitra Bestari:

Muhammad Ali, S. Ag, M. Si

Hijri Juliansyah, SE, M. Sc

Damanhur, Lc, MA

Nanda Amalia, SH, M. Hum

Dr. Nirzalin

Anismar, S. Ag, M. Si

Munardi, SE, ME

Hermandar Puteh, SE. MMSi

Setting/Lay-out:

Eriyanto Darwin

Diseminasi Elektronik (Website):

Rahmat Hidayat

Pemasaran/Sirkulasi:

Masura Rugayah

Fitriati, SE

Mahdi

Zainuddin

Hasanuddin, SE

Daftar Isi

1. Etika Belajar Dan Mengajar: (Suatu Upaya Meningkatkan Karakter dan Mutu Pendidikan)
Al Mawardi 1
2. Who Cares? We Do! The Social Responsibility of Peace Unit, USM for Rohingya Refugees in Penang Island
Aizat Khairi, Nik Harnida Suhainai, Mior Khairul Azrin, Norazrina Md. Jabarullah. 23
3. Refleksi Fonem Vokal Proto Austronesia Dalam Bahasa Melayu Dialek Langkat
Dewi Kumala Sari 39
4. The Influence Of Parents' Involvement In Motivating Students In Learning To Their Achievement In English (A Case Study at the Second Year Student of MAN Matangkuli)
Henny Irawati, S.Ag., M.Pd 51
5. The analysis of syntactic structure in written text of ESL learners of stage 2 and stage 4
Idaryani, S.S., M. Tesol. 75
6. Partisipasi Politik Masyarakat Pidie Jaya Dalam Pemilihan Umum 2014
M. Nazaruddin, Nirzalin 101
7. Strategi Pemberdayaan Guru Di SMP Negeri 1 Teupah Barat Kabupaten Simeulue
Sulfian, S.Pd. M.Pd. 121
8. Sistem Penyimpanan Arsip Pada Kantor Pemerintahan Kota Lhokseumawe
Sutriani, S.Sos., MSP 135

9. Pengembangan Konsep Kinerja Guru Dalam Pembelajaran
Syamsuddin, S.Pd., M.Pd 149
10. Metode dan Faktor Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Al-Quran)
Zuraida. S.AG.MA 163



Partisipasi Politik Masyarakat Pidie Jaya Dalam Pemilihan Umum 2014

M. Nazaruddin

*Program Studi Sosiologi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Email: nazaruddin_sosiologi@yahoo.com*

Nirzalin

*Program Studi Sosiologi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Email: nirzalinarmia@yahoo.co.id*

Abstrak

Political participation of voters in the general election was not only driven by socialization, emotional relationships and patterns of rationality but is predominantly influenced by sociological characteristics of voters. Sociological characteristics determine the behavior of voters in the general elections even in the presidential and legislature general election. Based on the case of Pidie Jaya district, this study would to show the complex reality of the forms of political participation and voting behavior of voters in the general election. Through qualitative methods and interactive-dialectical analysis, the study found that the sociological characteristics voter significant impact on voting behavior. Determination of the voter's choice is very dynamic, on one occasion voter underlying rational choice but on the occasion of selecting the next General Election they were at the previous General Election rationally choose can be switched on emotional behavior. Although, actors and political parties contributed to the voting behavior but sociologically characteristic dominant determining voter behavior in the general election.

Keywords: *Political Participation Voter Behavior sociological characteristics Election Pidie Jaya*

Abstrak

Partipasi politik pemilih dalam Pemilihan Umum ternyata tidak hanya didorong oleh sosialisasi, hubungan emosional dan pola rasionalitas tetapi secara dominan dipengaruhi oleh karakteristik sosiologis pemilih. Karakteristik sosiologis menentukan perilaku pemilih dalam pemilihan umum baik Pemilihan Umum Presiden maupun Pemilihan Umum legislatif. Berdasarkan kasus di Kabupaten Pidie Jaya, studi ini hendak menunjukkan realitas kompleks tentang bentuk partisipasi politik dan perilaku memilih para pemilih dalam Pemilihan Umum. Melalui metode kualitatif dan analisis interaktif-dialektis, penelitian ini menemukan bahwa karakteristik sosiologis pemilih berdampak signifikan terhadap perilaku memilih. Penentuan pilihan pemilih amat dinamis, pada satu kesempatan pemilih mendasari pilihannya secara rasional namun pada kesempatan memilih pada Pemilihan Umum berikutnya mereka yang pada Pemilihan Umum sebelumnya memilih secara rasional dapat saja beralih pada perilaku emosional. Meskipun, aktor dan partai politik ikut memberi kontribusi pada perilaku memilih namun pola karakteristik sosiologis secara dominan menentukan pola dan pergeseran perilaku memilih para pemilih dalam Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Partisipasi Politik Perilaku Pemilih Karakteristik Sosiologis Pemilihan Umum Pidie Jaya

PENGANTAR

Partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan umum yang berlangsung merupakan suatu wujud kepedulian terhadap kehidupan publik. Ajang demokrasi ini merupakan instrumen untuk memilih sebagian anggota masyarakat sebagai pihak yang akan memerintah dan mengatur kehidupan bermasyarakat. Sebab itu, anggota masyarakat yang terpilih sebagai wakil masyarakat merupakan cerminan dari suatu masyarakat. Jika masyarakatnya berkualitas, maka berkualitas pula hasil pilihannya. Demikian juga sebaliknya, jika masyarakatnya hanya “begitu-begitu saja” maka wakil yang terlahir dari mereka pun tidak dapat diharapkan dapat memperbaiki keadaan.

Partisipasi politik merupakan aktivitas warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik. Aktivitas warga Negara itu, meliputi pemberian suara (*voting*), menandatangani petisi atau demonstrasi penutupan jalan. Partisipasi politik meliputi warga negara yang tidak termasuk sebagai politisi atau pejabat pemerintahan termasuk pegawai negeri. Aktivitas yang dimaksud dalam partisipasi politik ini bukanlah termasuk aktivitas menonton acara debat politik di televisi atau hanya tertarik dengan politik. Aktivitas berarti perilaku eksternal yang ditampakkan oleh warga negara melalui tindakan voting, petisi dan sebagainya (Kaid & Haltz-Bach, 2008).

Politik pemberdayaan pemilih untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam suatu pemilu perlu diambil alih oleh masyarakat sipil yang terbebas dari politik praktis dan perebutan kekuasaan politik praktis. Politik pemberdayaan pemilih tidak saja akan berguna bagi peningkatan partisipasi pemilih dalam suatu ajang pemilu tetapi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat untuk menyiapkan diri mereka masing-masing untuk turun dan mengambil bagian dalam peristiwa politik itu sendiri. Lagi pula partisipasi rakyat dalam politik tidak boleh hanya berhenti dalam sekedar ikut memberi suara dalam pemilu tetapi juga harus ikut bertanggung jawab terhadap pilihannya dalam pemilu. Karena itu mereka perlu mengawasi pikiran dan tindakan wakil-wakilnya untuk tetap pro rakyat.

Politik pemberdayaan pemilih juga akan melahirkan wakil-wakil dan pemimpin rakyat yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Karena para wakil dan pemimpin mereka telah diseleksi oleh rakyat yang telah berdaya pula. Dengan demikian

ketika masyarakat diminta partisipasinya untuk memilih para wakil dan pemimpin mereka, maka mereka akan mampu memilih yang lebih mereka kenal, yang lebih baik dan lebih amanah dari yang memilih. Untuk itu para kandidat perlu memperkenalkan dirinya melalui proses sosialisasi diri yang akan memberi arti politik. Kurangnya sosialisasi diri yang dapat memberi arti politik positif diri akan menjadi dinding pemisah antara pemilih dan yang dipilih.

Pada masyarakat Pidie Jaya, perilaku dan polarisasi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya ini misalnya terkait erat dengan sosialisasi politik yang mereka terima. Begitupula dengan motif memilih yang tampak beragam antara yang didorong oleh pilihan rasional di satu sisi dengan yang didasari oleh dorongan emosional di sisi lain. Realitas lain yang menarik adalah lahirnya fenomena yang kontradiktif di daerah ini dimana pemilih dalam Pemilu 2014 untuk Pemilu legislatif jauh lebih besar daripada Pemilu Presiden 2014.

Pemilih dalam pemilihan Legislatif 9 April 2014 di Pidie Jaya adalah 78.586 orang dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 102.414 orang (Harian Medan Bisnis, 29 April 2014). Sedangkan, pemilih dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014, adalah 54.420 orang sementara Daftar Pemilih Tetap 102.399 orang (Web. KIP Pijay, 2014). Berdasarkan realitas tersebut maka selisih pemilih antara pemilih Pemilihan Umum legislatif (Pileg) dengan pemilih Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) di kabupaten Pidie Jaya adalah 23,58 %. Realitas ini menarik untuk dikaji lebih jauh, khususnya untuk memahami pola perilaku memilih dan motif dalam menentukan pilihan politik bagi pemilih di kalangan masyarakat Pidie Jaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menangkap dan memahami (*verstehen*) makna pikiran dan tindakan sosial dari sudut pandang dan penghayatan para anggota masyarakat Pidie Jaya yang telah memiliki hak dalam mengikuti (hak memberikan atau tidak memberikan suara) pemilihan umum. Karena itu perspektif yang digunakan dalam memahami fenomena dalam penelitian ini adalah perspektif etnografi. Sebagai penelitian etnografis, maka analisis sosial yang dilakukan haruslah menemukan pengetahuan bersama (*Mutual Knowledge*) dari suatu

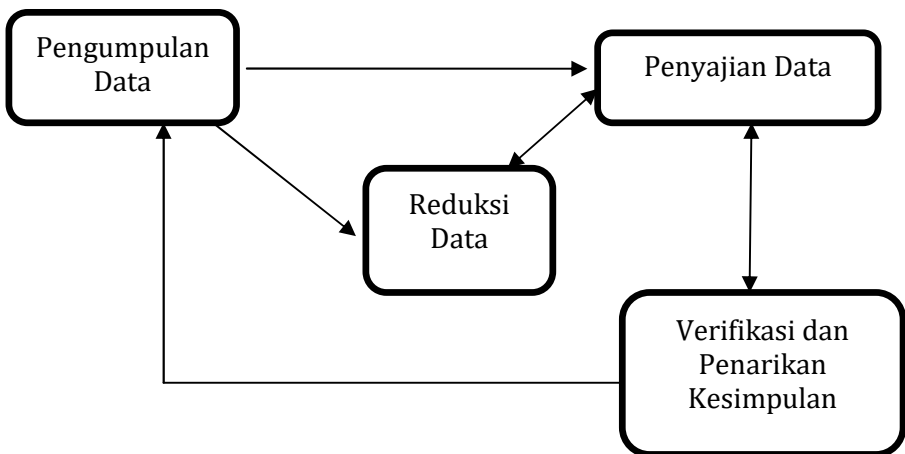
kesadaran praktis yang menjadi dasar dari praktik sosial itu (Antony Giddens, 1984: 337).

Pengetahuan bersama bukan merupakan rangkaian hal yang dapat dikoreksi melainkan merepresentasi skema interpretatif yang digunakan oleh sosiolog dan aktor awam untuk memahami aktivitas sosial yaitu untuk menghasilkan karakterisasi “yang dapat dikenali” mengenai aktivitas itu. Dengan demikian keterlibatan dalam kehidupan komunitas yang diamati merupakan satu-satunya alat bagi pengamat untuk mampu menghasilkan suatu pemahaman bagaimana mereka berpartisipasi dalam suatu rangkaian praktik sosial tertentu (Giddens, 1976). Melalui interaksi dialektis pengamat dan para aktor, maka makna tindakan aktor dapat dipahami dan dideskripsikan oleh peneliti. Proses penggalan data dilakukan melalui Wawancara Mendalam (*Indept Interview*), *Focus Group Discussion* (FGD) dan Penggunaan data-data dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.

Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Upaya penafsiran data yang berhasil diperoleh baik melalui Wawancara Mendalam (*Indept Interview*), Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dan Studi dokumen dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.

Bagan. 3.
Proses Analisis Data



Proses analisis data tersebut tidaklah dipahami sekali jadi dalam bentuk linier, akan tetapi proses itu mengikuti siklus yang bersifat interaktif dan bolak balik yang sudah harus dilakukan sejak saat pengumpulan data (Huberman,1992). Setelah itu data dianalisis melalui teknik interpretasi sebagaimana yang dipahami oleh Patton(Lexy J. Moleong,2000) yaitu untuk memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Konstruks Sosiologis dan Perilaku Memilih Masyarakat Pidie Jaya

Keberadaan geografis Pidie Jaya yang terfragmentasi dalam wilayah pantai dan kawasan pertanian agraris mempengaruhi pola-pola relasi sosial dan karakter utama masyarakatnya. Masyarakat Pidie Jaya yang mendiami kawasan pesisir (*baroh*) yang beriklim panas relatif rasional, apa adanya dan terbuka, sementara yang mendiami kawasan pegunungan (*tunong*) memiliki etos kerja tinggi, terikat dalam hubungan emosional yang kuat, ramah dan bersahabat. Meskipun, pola dan karakteristik berbeda namun masyarakat Pidie Jaya memiliki sistim pandangan dunia yang sama yaitu Islam. Kefanatikan terhadap Islam menempatkan sistim penilaian terhadap baik-buruk, benar salah relatif sama pula.

Di Pidie Jaya, Islam tidak hanya dimaknai sebagai agama tetapi juga sebagai sistem cara pandang dunia kehidupan (*worldview*) dalam menilai segala persoalan dan rujukan segala sikap serta keputusan, selain itu Islam juga dimaknai sebagai bagian dari identitas. Islam sebagai sistem cara pandang dunia kehidupan (*worldview*), terefleksikan pada ungkapan tradisional orang Aceh (Hadih Maja) yaitu, "*Hukom Ngon Adat Han Jeeut Cree, Lagee Zat Ngon Sifeut*". (Hukum/Syariat Islam dengan adat/kehidupan sosial tidak boleh bercerai seperti zat dengan sifatnya) (HM. Zainuddin, 1980: 110). Eratnya hubungan Islam dan orang Aceh ini melekat dalam filosofi kehidupan mereka yaitu, "*Ta Peutenteu Udep Lam Iseulam Sampo An matee*" (Kita pastikan hidup kita dalam Islam sampai mati), (Ismuha, 1983: 11).

Kesamaan pandangan dunia (*worldview*), membuat masyarakat Pidie Jaya memiliki konstruksi idealitas yang sama pula terhadap figur kepemimpinan politik. Masyarakat Pidie Jaya, mensyaratkan figur pemimpin politik yang islami dan religius,

satunya kata dan perbuatan (*Peu Gah Lagee peu Buet, Peubut Lagee Peugah*) memiliki kemampuan untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan lebih baik dunia dan akhirat, bersih dari korupsi dan memiliki kecakapan dalam memimpin.¹

Meskipun demikian, dalam menentukan figur pemimpin politik yang dipilih dalam pemilihan Umum baik Pemilu Legislatif maupun presiden mengalami fragmentasi. Meskipun sama-sama mensyaratkan figur yang islami dan memiliki rekam jejak yang bersih. Namun, masyarakat Pidie Jaya wilayah pegunungan relatif memperhatikan aspek-aspek emosional dalam menentukan pilihan. Aspek emosional itu adalah figur yang memiliki hubungan darah, sederhana, seetnis atau hubungan masa lalu terkait dengan kepentingan daerah seperti kasus memilih Jokowi sebagai presiden dalam Pemilu 2014 lebih karena faktor Jusuf Kalla yang dipandang berjasa membuat Aceh damai. Sebaliknya, masyarakat Pidie Jaya kawasan pesisir cenderung rasional dan kalkulatif.

Atmosfir Politik Jelang Pemilu Legislatif dan Presiden

Letak geografis Kabupaten Pidie Jaya di jalur pantai timur Aceh, menjadikan masyarakat di wilayah ini memiliki karakteristik khas orang pantai yaitu terbuka, apa adanya namun cukup ramah dalam berinteraksi dengan siapapun. Keterbukaan dan keramahan masyarakat di wilayah ini merupakan modal sosial penting yang membungkus interaksi-interaksi sosial mereka yang konstruktif dan produktif, tidak terkecuali dalam politik. Pasca reformasi dan konflik, harapan terhadap perubahan tata kelola pemerintahan tinggi di wilayah ini. Realitas ini berbeda dengan era Orde baru dan konflik politik di Aceh, tata kelola pemerintahan yang buruk dimana sistem pemerintahan yang tidak transparan, kebijakan yang berasaskan keinginan penyelenggaraan pemerintahan (*Top Down*), bukan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyertainya menjadi dasar bagi frustasinya masyarakat terhadap politik. Hal itu menyebabkan partisipasi politik menjadi rendah. Kalaupun terdapat masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tidak didorong oleh motivasi partisipasi melainkan adanya mobilisasi oleh elite-elite politik yang berkepentingan.

¹ Wawancara dengan Fitri, Muhammad Abdul Ghani, Adi, Faisal, Munawir, Murdani, Hasan Hanafiah dan Zulkarnaini, tanggal 8 Juli 2015

Namun, pasca Orde Baru dan terlebih setelah lahirnya perdamaian di Aceh pada pertengahan 2005 optimisme terhadap politik kembali muncul. Harapan terhadap perubahan kehidupan dari keterpurukan ekonomi dan sosial pada masa konflik kembali tumbuh dan besar. Perpaduan antara harapan dan keterbukaan ruang publik yang dijamin oleh konstitusi sejak pasca reformasi di Indonesia menjadikan masyarakat Pidie Jaya memiliki antusiasme yang tinggi pula dalam berpartisipasi dalam proses-proses politik.

Kebebasan ruang publik (*free public sphere*) tidak hanya terjadi dalam konstitusi, realitas empiris juga mengiyakan hal yang sama. Meskipun ancaman-ancaman halus terjadi namun secara umum atmosfir politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Pidie Jaya pada 2014 baik Pemilihan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) kondusif.

Realitas ini ditegaskan oleh beberapa warga Pidie Jaya yang menjadi informan dalam diskusi *Focus Group Discussion* (FGD) seperti Adi, Faisal, Munawir dan Murdani. Mereka mengatakan:

*“Jelang pemilu dikampung-kampung kami suasana relatif aman. Masyarakat beraktivitas seperti biasa. Para anggota tim sukses banyak yang mendatangi kami, tidak hanya sekali tetapi sampai beberapa kali. Mereka berasal dari berbagai partai baik partai nasional maupun partai lokal yang menitipkan calon mereka pada partai nasional. Mereka masing-masing mengajak memilih orang-orang yang mereka jagokan. Ada yang menawarkan program tetapi ada juga yang mengajak karena alasan saudara atau orang sekampung. Ada juga tetapi dalam jumlah kecil anggota tim sukses yang memberi ancaman halus seperti kalau tidak memilih calon dari kami berarti perlu bersiap Aceh kembali konflik”.*²

Namun, ancaman dan gertakan politik semacam itu tidak terlalu dihiraukan oleh masyarakat Pidie Jaya. Sebab, keterbukaan media, jaringan sosial masyarakat Pidie Jaya dengan dunia luar yang luas melalui perantaraan anak mudanya, kewibawaan tokoh-tokoh ulama kharismatik Pidie Jaya yang secara historis mampu meredam ancaman kekerasan, pengetahuan politik warga yang semakin baik, ikatan solidaritas dan komunitas yang tinggi dan kesadaran politik yang tinggi berhasil menjadi modal sosial dan

² Focus Group Discussion dengan warga Pidie Jaya, 8 Juli 2015

budaya yang memberi jaminan keamanan eksistensial bagi masyarakat.

Terbukti ancaman-ancaman minimalis dalam Pemilu baik pemilu Legislatif maupun presiden tidak terwujud dalam kekerasan sebagaimana diwilayah tetangganya, Pidie, Bireuen dan Aceh Utara. Kondusifitas atmosfir politik melahirkan gairah masyarakat untuk berpartisipasi didalam pelbagai tahapan Pemilu. Disini, Pemilu merupakan pengejawantahan dari pesta rakyat dimana rakyat dapat bersuka cita dalam menentukan sikap politiknya baik dalam menentukan siapa yang didukung maupun yang tidak ia dukung.

Sosialisasi dan Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Pidie Jaya

Beberapa ilmuwan sosial telah mendefinisikan sosialisasi politik, Herbert H. Hyman misalnya, mendefinisikan sosioalisasi politik sebagai proses belajar dari pengalaman warga masyarakat atau sub-kelompok, yang semula menghasilkan keteraturan, keseragaman yang secara langsung relevan bagi stabilitas sistim politik dan yang kemudian menghasilkan keragaman dan bentuk-bentuk institusional dari pengawasan. John W. Ellsworth dan Arthur A. Stahnke mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses kesadaran politik sejak kecil hingga dewasa, yaitu bagaimana seseorang belajar nilai-nilai dan sikap sosial yang memengaruhi kehidupan politik. Adapun Doris Graber mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses ketika orang mempelajari struktur dan faktor lingkungan, sekaligus mempelajari dan menginternalisasi aturan-aturan dan perilaku mengenai kehidupan politik (Graber, 2002: 197).

Partisipasi politik merupakan aktivitas warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik. Aktivitas warga Negara itu, meliputi pemberian suara (*voting*), menandatangani petisi atau demonstrasi penutupan jalan. Partisipasi politik meliputi warga negara yang tidak termasuk sebagai politisi atau pejabat pemerintahan termasuk pegawai negeri. Aktivitas yang dimaksud dalam partisipasi politik ini bukanlah termasuk aktivitas menonton acara debat politik ditelevisi atau hanya interes tertarik dengan politik. Aktivitas berarti perilaku eksternal yang ditampakkan oleh warga Negara melalui tindakan voting, petisi dan sebagainya (Kaid & Haltz-Bach, 2008).

Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan didalam sistim politik. Menurut, Michael Rush dan Philip Althoff, partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun perlu menjadi catatan bahwa partisipasi politikpun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat berjalan (Rafael Raga Maran, 2001: 148). Etalase teoritik diatas menegaskan benang merah bahwa sosialisasi dan partisipasi berkait erat. Dalam kasus Pidie Jaya, partisipasi masyarakat dalam kedua Pemilu diatas baik Pemilu Legislatif maupun Presiden beragam. Bentuk dan pola partisipasi ada yang bersifat memberi hak suara (voting) ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), kritis terhadap para aktor politik, bahkan tidak bersedia untuk memilih (Golongan Putih). Keberagaman partisipasi ini dipicu oleh beragamnya sosialisasi yang diterima oleh mereka.

Dalam kasus masyarakat di Blang Reu misalnya, Pemilu Presiden tidak diikuti secara massif oleh masyarakat karena sosialisasi berupa kampanye tidak sampai kepada mereka. Para aktor politik dan tim suksesnya tidak melakukan sosialisasi apapun kepada mereka. Meskipun masyarakat tau ada Pemilu Presiden dari televisi, baliho dan spanduk yang dipajangkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya. Realitas ini diantaranya diungkapkan oleh beberapa pemuda setempat dalam Focus Group Discussion (FGD) didesa setempat. Mereka mengatakan: "Kami tidak ikut memilih pada Pemilihan Umum Presiden karena tidak ada satu pihakpun yang mengadakan kampanye ke gampoeng kami. Kami tidak mengenal kedua calon presiden, tidak tau pula bagaimana program-programnya untuk peningkatan kesejahteraan kami".³

Keterikatan yang kuat secara sosial dimana para kontestan memiliki hubungan emosional terlalu kuat dengan pemilih juga menjadi alasan kuat pula bagi pemilih untuk tidak menentukan pilihannya. Sosialisasi dengan mengatasnamakan pertemanan *an sich* juga menjadi kurang efektif dalam mendongkrak partisipasi. Hal ini diantaranya diungkapkan oleh Muhammad Abdul Gani, ia menyebutkan:

³ Focus Group Discussion (FGD) di gampoeng Blang Reu Pidie Jaya. Peserta Adi, Faisal, Munawir, Murdani, Firman, Nazar dan Nirzalin

*“Teman-teman saya banyak yang menjadi Calon Legislatif. Semua mereka meminta saya untuk memilihnya. Diantara mereka memiliki kompetensi yang relatif sama. Namun, kelemahan merekapun sangat saya ketahui. Pertemanan kami yang akrab menyebabkan saya harus menjaga hubungan baik diantara sesama mereka. Saya tidak mau gara-gara politik hubungan kami menjadi retak. Untuk menjaga itu akhirnya saya tidak memilih. Kalau saya pilih yang satu pasti yang lain tersinggung”.*⁴

Dalam konteks yang lain, perilaku para aktor politik yang dinilai melenceng dari nilai dan norma yang dianut oleh masyarakatpun secara tidak disadari telah berhasil pula mensosialisasikan sikap kontra terhadap partisipasi. Perilaku korupsi, nepotisme dan kolusi yang kerap kali dipertontonkan oleh pelaku politik menjadi dasar warga apatis untuk memilih. Salah satu informan, Fitri mendeskripsikan sikapnya sebagai berikut:

*“Saya kecewa dengan banyak figur politisi yang tidak bersih. Figur-figur politisi itu meskipun labelnya berasal dari partai agama seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ternyata mereka juga banyak yang korup. Politik itu kotor, tampaknya benar. Saya pernah memilih salah satu figur politik yang saya anggap bersih dan berkompeten, ternyata setelah memimpin ia korup juga. Maka, di Pemilu 2014 lalu saya tidak memilih”.*⁵

Tatkala sosialisasi berjalan dengan baik dan efektif secara diametral berkontribusi pada terkatrolnya partisipasi warga dalam politik. Partisipasi tersebut, dimulai dengan lahirnya pembacaan kritis dan lalu sikap kritis pula terhadap para kontestan politik. Sosialisasi politik yang terjadi melalui media, teman bermain (*peer group*), perilaku politik politisi maupun kampanye menjadi catatan kritis warga masyarakat. Merekapun menjadi kritis dalam mempertimbangkan siapa yang akan dipilih saat berada dalam bilik suara.

⁴ Wawancara dengan Muhammad Abdul Gani warga Meureudu, tanggal 8 Juli 2015

⁵ Wawancara dengan Fitri, tanggal 8 Juli 2015

Hal ini ditegaskan oleh Zulkarnaini, ia mengatakan:
*“Figur yang kita pilih haruslah mereka yang berkompeten. Artinya, ia memiliki kecakapan dalam memimpin. Jujur, ikhlas dan religius. Seseorang itu juga harus memiliki kepedulian yang tinggi pada masyarakat Aceh. Sehingga ia kita yakini mampu menjadi pemimpin kita menuju kehidupan yang lebih baik. Figur yang seperti itu kita nilai berdasarkan latar belakangnya saat ia menduduki jabatan tertentu sebelumnya. Jangan sampai kita memilih kucing dalam karung”.*⁶

Kesadaran terhadap pentingnya terlibat dalam proses-proses politik agar dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan politik ditunjukkan oleh masyarakat Pidie Jaya melalui pemberian suaranya (*voting*) dalam bilik suara. Hasan Hanafiah menyebutkan: “Saya datang ke TPS dan memilih figur yang saya pandang berkompeten, bersih, aspiratif dan peduli dengan kesulitan masyarakat”.⁷ Pelbagai realitas diatas mengungkapkan betapa sosialisasi politik menentukan bagaimana bentuk partisipasi politik warga masyarakat Pidie Jaya. Dalam konteks ini, maka sosialisasi politik dan partisipasi politik merupakan dua sisi mata uang yang saling terkait, terhubung dan tidak terpisahkan. Dengan demikian, agar politik beserta kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya bernilai positif, konstruktif, produktif dan menyejahterakan sedari awal haruslah dimulai dengan partisipasi warganya dalam proses-proses politik. Partisipasi hanya mungkin menjadi positif, konstruktif dan produktif hanya jika diawali oleh sosialisasi yang massif, efektif dan positif pula.

Partisipasi Politik Warga Dalam Pemilihan Legislatif

Partisipasi politik merupakan usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik yaitu usaha pengerahan massa oleh golongan elite politik

⁶ Wawancara dengan Zulkarnaini, tanggal 13 juli 2015

⁷ Wawancara dengan Hasan Hanafiah, tanggal 15 Juli 2015

untuk mendukung kepentingan-kepentingannya (Rafael Raga Maran, 2001: 147).

Partisipasi lahir dari kesadaran, kebebasan dan pengetahuan subjektif warga negara dalam menentukan apapun sikap politiknya. Sebaliknya, mobilisasi merupakan suatu rekayasa yang dilakukan oleh elite politik untuk kepentingan-kepentingan pragmatis mereka. Maka partisipasi warga dalam proses politik merupakan keniscayaan demokrasi, sebaliknya mobilisasi warga dalam proses politik apalagi dengan kekerasan merupakan anarkhisme terhadap demokrasi.

Partisipasi warga negara dalam proses-proses politik merupakan salah satu ciri pembeda utama antara sistim politik demokrasi dengan sistim-sistim politik lainnya. Maka, partisipasi warga merupakan dasar dan ruh dari demokrasi. Demikian pentingnya partisipasi warga sehingga disaat menjelang ajalnya, Pericles pendiri sistim politik demokrasi pertama kali di dunia dari Yunani berkali-kali menegaskan dalam catatan akhir Pidatonya. Ia menulis;

“Disini (negara demokrasi) tiap orang tidak boleh hanya memikirkan urusannya sendiri tetapi ia juga harus memikirkan urusan negara, walau kenyataannya mereka yang memikirkan bisnisnya tentunya sangat memperhatikan situasi politik secara umum. Ini cirri khas kita: kita tidak mengatakan bahwa orang yang tidak berminat pada politik adalah orang yang memikirkan urusannya sendiri tetapi kita sebut dia tidak memiliki urusan sama sekali disini. Kita, yang dalam diri kita mengaku sebagai warga Athena, mengambil keputusan yang lalu kita jadikan kebijakan atau mendiskusikan mereka dengan sebaik-baiknya. Karena menurut kita tidak ada teori ataupun kebijakan yang tidak dapat dipraktikkan, dan hal yang terburuk adalah terburu-buru melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan dengan matang akibat-akibatnya” (David Held, 2006: 6).

Di Pidie Jaya, atmosfir politik yang kondusif menjadi ruang bagi lahirnya partisipasi politik warga. Pada Pemilihan Umum Legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2014 masyarakat dengan antusias mengikuti proses-proses politik mulai dari keterlibatan aktif dalam kampanye maupun mendatangi bilik suara. Warga merasa penting untuk memilih wakil-wakil mereka di Parlemen sebab keterwakilan di Senayan dinilai sebagai sesuatu

yang memiliki relevansi dan signifikansi dengan kepentingan-kepentingan masyarakat Aceh umumnya dan warga Pidie Jaya khususnya.

Salah satu warga Pidie Jaya, Zulkarnaeni mengatakan:
*“Saya merasa sangat perlu kita ikut serta dalam proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pusat. Keikutsertaan itu bukan hanya sekedar untuk menyemarakkan Pemilu tetapi lebih dari itu, adanya wakil kita di Jakarta akan ada pihak yang memperjuangkan nasib kita. Aceh tidak mungkin maju dan sejahtera kalau hanya dipikirkan dan dibangun oleh pemerintah kita saja, tetapi perlu ada kebijakan-kebijakan dari pusat. Kalau wakil kita tidak ada disana, maka siapa yang akan memperjuangkan Aceh. Kita rasakan konflik sudah selesai tapi kesejahteraan kita juga belum berubah. Maka ada wakil kita di Jakarta yang peduli dengan nasib kita orang Aceh menjadi penting. Bahkan lebih penting dari memilih Presiden”.*⁸

Alasan memilih figur sebagai anggota legislatif bervariasi dikalangan masyarakat Pidie Jaya. Motivasi didorong oleh pandangan-pandangan subjektif masing-masing. Ada yang memilih karena kesadaran dan pertimbangan rasional, namun ada pula karena dorongan-dorongan emosional. Secara umum, pola pemilihan berdasarkan kesadaran dan pertimbangan rasional didominasi oleh mereka yang tinggal dikawasan perkotaan dan pesisir seperti kota Meureudu, Teupin Raya dan Uleu Gleu. Sebaliknya, pemilih yang berasal dari pedesaan dan daerah pegunungan (pedalaman) cenderung mengedepankan aspek emosional seperti hubungan kekerabatan, sedaerah maupun karena sering tampil di televisi.

Terkait dengan memilih berdasarkan pertimbangan rasional, misalnya disebutkan oleh Hasan Hanafiah:

“Bagi saya figur yang saya pilih adalah seseorang yang saya kenal. Ia haruslah orang yang amanah, jujur dan selama ini menunjukkan kepedulian pada kita. Kerja kongkrit yang ditunjukkan misalnya sering memberi kita bantuan uang, sembako

⁸ Wawancara dengan Zulkarnaini di Meureudu Pidie Jaya, tanggal 9 Juli 2015

dan kebutuhan-kebutuhan lainnya disaat kita butuh seperti mau lebaran dan lain sebagainya".⁹

Sementara, motivasi-motivasi memilih karena dorongan-dorongan emosional, misalnya di tunjukkan oleh pernyataan salah satu warga Blang Reu, Murdani . Ia mengatakan:

"Banyak orang yang kita pilih setelah duduk di dewan tidak peduli lagi dengan nasib kita. Mereka baik saat berkampanye saja. Waktu kampanye selain janji-janji mereka juga sering memberi kita bantuan-bantuan tetapi setelah mereka terpilih mereka tida peduli lagi. Mereka hidupnya semakin kaya, sementara kita tetap saja sama tidak ada perubahan. Maka, lebih baik memilih berdasarkan hubungan saudara saja. Kalau saudara sendiri pasti peduli sama kita. Paling tidak waktu lebaran dia akan bersilaturahmi dan kalau kita ada musibah ia akan datang berkunjung dan membantu. Pintar atau tidak, tidak terlalu penting yang penting orangnya baik".¹⁰

Hal yang sama juga disebutkan oleh Muhammad Abdul Gani, ia mengatakan: "Hal yang terpenting dari calon yang kita pilih saat ini bukan kompetensi tetapi hubungan darah. Untuk apa memilih yang berkompeten tetapi akhirnya menipu. Lebih baik memilih saudara sendiri. Sepelit-pelitnya dia pasti nanti ia akan bantu kita juga".¹¹ Realitas ini menunjukkan variasi motivasi para pemilih dalam pemilihan legislative pusat di Pidie Jaya. Namun, sikap masyarakat yang memberi suaranya dalam pemilu patut diapresiasi. Apapun bentuk motivasi warga, tindakan partisipasi dalam pemilu menunjukkan kepedulian mereka terhadap politik amat berharga dalam mewujudkan demokrasi di negeri ini.

Partisipasi Politik Warga Dalam Pemilihan Umum Presiden

Berbeda dengan Pemilihan anggota legislatif yang disambut dengan sikap tegas tanpa keraguan, pemilihan umum presiden (Pilpres) 2014 menghadapkan masyarakat Pidie Jaya pada

⁹ Wawancara dengan Hasan Hanafiah warga Teupin Raya, tanggal 10 Juli 2015

¹⁰ Wawancara dengan Munawir warga Blang Reu, 8 Juli 2015

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Abdul Gani, warga Meureudu, 11 Juli 2015

ambiguitas. Sikap gamang masyarakat terkait dengan dua figur Presiden yang harus dipilih karena dipicu oleh perseberangan sikap politik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh juga keinginan subjektif dari masyarakat sendiri. Konstestasi presiden yang melibatkan Joko Widodo dan Prabowo menghadirkan posisi dilematis bagi masyarakat. Dipucuk pimpinan Aceh, Gubernur Zaini Abdullah mendeklarasikan diri sebagai pendukung Joko Widodo sebagai presiden sebaliknya Wakil Gubernur, Muzakkir Manaf merupakan pendukung Prabowo.

Masalahnya, pucuk pimpinan Aceh tersebut merupakan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Wakil Gubernur merupakan ketua umum partai Aceh yang merupakan partainya orang-orang GAM dan simpatisannya sementara Gubernur adalah Ketua Tuha Peut (Ketua Dewan Pembina) Partai Aceh. Keterikatan emosional yang kuat antara masyarakat dengan Gerakan Aceh Merdeka dalam konflik 29 tahun dengan pemerintah Indonesia membuat mereka bimbang menentukan sikap memilih mengikuti Muzakkir Manaf atau Zaini Abdullah.

Pada masa konflik pemupukan hubungan emosional antara masyarakat dengan Gerakan Aceh merdeka berlangsung intensif dan mengalami internalisasi yang massif. Sebab, antara masyarakat dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka terikat dalam hubungan saling “menerima” dan “memberi” dimana keluhan-keluhan masyarakat terhadap kekerasan aparat disahuti oleh GAM dengan aksi balas. Disisi lain masyarakat bersedia menjadi pendukung logistik perang dan informasi intelijen. Kenyataan itu membuat masyarakat menganggap GAM adalah bagian dari mereka (*Ureueng Droe*) dan aparat militer sebagai orang lain bahkan musuh (*The Otherness/Si Pai*) yang harus dilawan (Nirzalin, 2012: 173).

Pada sisi lain, profil kedua calon Presiden tersebut bertolak belakang yang satu sipil yang produktif sementara yang satunya militer yang sukses. Konteks Aceh pasca damai sejatinya adalah kondisi dimana pembangunan dalam pelbagai sektor harus digenjut. Pada kenyataan ini maka yang dibutuhkan adalah figur Presiden yang telah teruji mampu melakukan tindakan-tindakan kongkrit tidak hanya meletakkan dasar pijakan pembangunan tetapi menggerakkannya sehingga kesejahteraan beranjak lebih baik. Didasari oleh kebutuhan ini, maka seharusnya presiden yang dipilih adalah Jokowi. Namun, arahan dari pimpinan utama Gerakan Aceh Merdeka justeru memilih Prabowo.

Trauma masyarakat terhadap figur militer, utamanya pimpinan militer yang terlibat dalam konflik Aceh belum lagi pulih tetapi pucuk utama pimpinan GAM malah mempersuasi mereka untuk memilih calon presiden berlatar belakang militer. Situasi ini menghadapkan mereka pada posisi dilematis karena disatu sisi mereka ingin tetap setia pada GAM tetapi disisi lain mereka trauma dengan sesuatu yang berbau militer. Hal ini pada akhirnya membuat masyarakat Pidie Jaya umumnya terbelah dalam menentukan sikap politik. Sebagian memilih Prabowo dan bagian yang lain memilih Jokowi. Pertimbangan rasional dan emosional saling tarik menarik dalam menentukan sikap pada Pilpres 2014.

Salah satu warga Blang Reu, Murdani menyebutkan:

“Pada Pemilu Presiden kami ikut memilih. Kalau tidak ikut tidak seru sebab semua orang ikut. Saya memilih berdasarkan siapa yang dipilih oleh teman-teman saja. Yang penting ikut daripada tidak. Kami ikut saja arahan dari Doto Zaini milih Jokowi”.¹² Sementara, warga lain tampak lebih rasional dalam menentukan sikap, misalnya diungkapkan oleh Adi,

“Saya memilih calon Presiden yang jelas-jelas menunjukkan telah pernah bekerja nyata untuk kepentingan masyarakat. Pada Pilpres kali ini saya memilih Jokowi. Tapi bukan karena Jokowi tetapi karena pasangan wakil Presidennya Yusuf Kalla. Yusuf Kalla telah menunjukkan kerja nyatanya bagi orang Aceh. Dialah yang memprakarsai perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005 sehingga Aceh hingga hari ini menjadi daerah yang damai. Berubah dari darul harb (negeri perang) ke Darussalam (negeri yang aman)”.¹³

Fragmentasi duo Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf yang pada awalnya diprediksi oleh sebagian pengamat akan menimbulkan fragmentasi pula dimasyarakat sehingga akan menyebabkan minimnya partisipasi dalam Pemilu Presiden 2014 ternyata tidak terbukti. Realitasnya, meskipun tidak seentusias pemilihan Legislatif, partisipasi masyarakat Pidie Jaya dalam Pemilihan Presiden cukup signifikan dan berlangsung meriah. Hal itu terbukti dengan ramainya masyarakat mengikuti pesta demokrasi ini. Realitas ini termanifestasi dari gambaran yang

¹² Wawancara dengan Murdani warga Blang Reu, tanggal 8 Juli 2015

¹³ Wawancara dengan Adi warga Blang Reu, tanggal 9 Juli 2015

diungkapkan oleh Hasan Hanafiah dan Zulkarnaini, mereka mengatakan:

“Kami ikut memilih dalam Pemilihan Presiden lalu (2014). Karena, presiden lah yang pada akhirnya menentukan ada tidaknya perubahan terhadap kehidupan kita. Sebab itu, kami memilih berdasarkan figur yang kami nilai lebih baik. Pada hari pelaksanaan Pemilu Presidenpun masyarakat ramai-ramai mendatangi Tempat Pemungutan Suara. Bahkan sejak pukul. 8 pagi TPS-TPS sudah banyak diantri oleh warga”.¹⁴

Realitas diatas memotret antusiasme warga terhadap partisipasinya dalam pemilihan presiden. Meskipun, tingkatan partisipasi masyarakat terhadap Pemilu presiden lebih rendah dibanding dengan Pemilu Legislatif karena dinilai memiliki kepentingan lebih tinggi sebab bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat yang terekam dalam realitas Pemilu Presiden tetap signifikan. Atmosfir politik yang tenang dan ketersediaan ruang publik yang bebas (*Free Public Sphere*) berhasil mengkatrol gairah masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik berdasarkan keputusan-keputusan mereka yang independen dan otonom.

SIMPULAN

Demokrasi hanya lahir, tumbuh dan berkembang tatkala partisipasi masyarakat dalam proses-proses politik berlangsung secara intensif, independen dan otonom. Bercermin pada kasus masyarakat Pidie Jaya, partisipasi masyarakat dalam proses-proses politik seperti Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden 2014 meniscayakan ketersediaan atmosfir politik yang kondusif. Dalam arti kata, tersedia suatu ruang kebebasan sosial yang memungkinkan warga tidak hanya terlibat dan melibatkan diri dalam proses politik tetapi juga menentukan pilihan politiknya dalam bilik suara secara independen dan otonom tanpa adanya intimidasi, provokasi dan apalagi kekerasan.

Partisipasi terkait dengan sosialisasi dan sosialisasi terkait pula dengan partisipasi. Hubungan dualitas ini tidak terpisahkan dalam proses munculnya tindakan-tindakan warga dalam proses politik. Pola dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses

¹⁴ Wawancara dengan Hasan Hanafiah dan Zulkarnaini warga Meureudu, tanggal 9 Juli 2015

politik terkait dengan sosialisasi yang diterima, maka dalam kasus masyarakat Pidie Jaya ditemukan pola dan bentuk partisipasi yang beragam. Pola dan bentuk partisipasi itu adalah kritis, menolak memilih, ikut-ikutan memilih, memilih dengan pertimbangan emosional berdasarkan ikatan kekerabatan dan memilih secara rasional.

Massif atau tidaknya partisipasi masyarakat dalam proses politik seperti Pemilihan Umum juga terkait dengan tafsir masyarakat terhadap seberapa besar hubungan aktor-aktor politik yang dipilih dengan kepentingan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Pada masyarakat Pidie Jaya realitas ini terkonfirmasi pada lebih banyaknya pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif daripada Pemilihan Umum Presiden. Tindakan ini dikontrol oleh pandangan bahwa wakil rakyat yang duduk disenayan lebih berhubungan langsung dengan kepentingan peningkatan kesejahteraan mereka daripada presiden. Sebab, para wakil rakyat itu berasal dari Aceh, mengerti dan memahami kondisi kongkrit kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat, karena itu, mereka lebih diharapkan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Berbeda dengan presiden, meskipun diharapkan dapat merubah keadaan kesejahteraan, namun masyarakat belum terlalu mengenalnya sehingga keyakinan untuk dapat menyalurkan aspirasi tidak setebal pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh mereka dalam Pemilihan Umum Legislatif.

Daftar Pustaka

- Faisal, Sanafiah. 2003. *Filosofi dan Akar Tradisi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- , 2003. *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Rajawali. Jakarta
- Kaid, Linda Lee & Holtz-Bacha, Christina. 2008. *Encyclopedia of Political Communication*. New York: Sage Publication
- Graber, A. David. 2002. *Mass Media and American Politics*. Washington D.C: A Divition of Congressional Quartely
- Giddens. Antony, 1984. *The Constitution of Society, Outline of The Theory of Structuration*, Cambridge UK: Polity Press

- , 1976. *New Rules of Sociological Method*, London: Hutchinson
- Held, David. 2006. *Models Of Democracy*. UK; Polity Press
- ISMUHA, 1983. *Adat dan Agama di Aceh*, Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Haberman, 1992. *Qualitative Data Analysis Data*. Jakarta: UI Press
- Maran, Rafael, Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nirzalin. 2012. *Ulama dan Politik Di Aceh, Menelaah Hubungan Kekuasaan Teungku Dayah dan Negara*. Yogyakarta: Maghza Pustaka
- Subiakti, Henry & Rachmah Ida. 2012. *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana
- Sunny. Ismail, et.al, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980)
- Harian Medan Bisnis, 29 April 2014

Daftar Informan :

1. Fitri, 28 Tahun Pegawai Negeri Sipil
2. Muhammad Abdul Ghani, 43 Tahun Wiraswasta
3. Adi, 23 Tahun Petani
4. Faisal, 35 Tahun Petani
5. Munawir, 38 Tahun Petani
6. Munawir, 40 Tahun Petani
7. Murdani, 43 Tahun Petani
8. Hasan Hanafiah, 32 Tahun Wiraswasta
9. Zulkarnaini, 45 Tahun Wiraswasta





Pasai

Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial

Diterbitkan oleh:

**Lembaga Penelitian & Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM)**

Universitas Malikussaleh

Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 26, Lancang Garam
Lhokseumawe 24351

Nanggroe Aceh Darussalam
Indonesia

ISSN 1979-1755



9 771979 175525